

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai kasus korupsi kegiatan pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Proses penganggaran dalam pengadaan UPS hanya melalui Pembahasan Internal Komisi E DPRD DKI Jakarta tanpa melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
2. Proses penganggaran kegiatan pengadaan UPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan kebutuhan barang yang memadai.
3. Adanya pengaturan dalam kegiatan proses pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dan pengaturan dalam penetapan spesifikasi barang yang mengarah ke produk tertentu.
4. Dalam proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan UPS tidak dilakukan secara jujur karena terjadi persaingan yang tidak sehat

dalam proses pelelangan seperti adanya dugaan pembagian grup peserta lelang, adanya harga penawaran yang hampir sama dari pesertalelang dan mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta pola harga penawaran yang hampir sama yang dilakukan oleh peserta lelang dan lain-lain.

5. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) tidak berdasarkan dari kebutuhan sekolah dan adanya pemaksaan secara struktural di dalam kegiatan pengadaan tersebut.
6. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan UPS tidak ada satupun yang dilakukan oleh para pemenang lelang karena seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh ketiga perusahaan distributor UPS yaitu PT Offistarindo Adhiprima, PT Istana Multimedia, dan PT Duta Cipta Artha.
7. Kegiatan pengadaan UPS yang berdasarkan dari hasil pembahasan internal Komisi E DPRD, setelah direalisasikan ternyata barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara efektif oleh sekolah-sekolah yang menerima UPS sehingga tujuan dalam penganggaran APBN/APBD adalah untuk memberikan manfaat dan keefektifan tidak tercapai.
8. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran peraturan yang melibatkan pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak swasta yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dan korporasi

sehingga mengakibatkan kerugian untuk negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut.

9. Terjadi kecurangan di dalam kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Provinsi DKI Jakarta yang merugikan negara sebesar Rp. 160 miliar atau sekitar jumlah tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dan berperan di dalam kegiatan pengadaan UPS yang sudah divonis yaitu Alex Usman dengan Pidana selama 6(enam) tahun kurungan penjara dan denda subsider Rp500 juta subsider kurungan enam bulan penjara dan Zainal Soleman dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda subsider Rp. 200juta subsider kurungan 1 (satu) bulan, serta untuk Fahmi Zulfikar, M. Firmansyah, dan Harry Lo masih dalam tahap penyelidikan dan berstatus tersangka. Korupsi di dalam kegiatan pengadaan UPS dilakukan dengan modus mark up harga untuk mrndapatkan keuntungan pribadi atau korporasi dan dengan memanfaatkan kedekatan antara Harry Lo dan dengan Alex Usman

5.2 Saran

Setelah melihat hasil analisis terhadap kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply di Provinsi DKI Jakarta. Maka saran untuk mencegah supaya hal yang sama tidak terulang kembali adalah :

1. Semua hasil pembahasan RAPBD wajib dibuatkan laporan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh wakil dari pihak eksekutif dan pihak legislatif serta selanjutnya laporan hasil pembahasan yang sudah disetujui tersebut disimpan sebagai bukti jika suatu saat dibutuhkan.
2. Usulan kegiatan yang akan masuk ke dalam APBD yang tidak melalui proses pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD wajib untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan maksud dan tujuan anggaran kegiatan tersebut.
3. Dalam pengadaan barang dan jasa berikutnya, untuk lembaga yang berwenang dalam mengatur pengadaan barang dan jasa supaya meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa supaya tidak terulang kembali kesalahan seperti yang terjadi di dalam kasus korupsi kegiatan pengadaan Uninterruptible Power Supply di Provinsi DKI Jakarta.